



## Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru 1974-1978 : dari MALARI hingga NKK/BKK

*Student Movement During the Orde Baru Period 1974-1978: from MALARI to NKK/BKK*

Rahayu Hardita Dwi Widyanti<sup>1✉</sup>, Yusuf Budi Prasetya<sup>2</sup>, Irfan Ahmad Fauzi<sup>3</sup>

<sup>1✉ 2 3</sup> Universitas Indraprasta PGRI

E-mail: [r.hardita90@gmail.com](mailto:r.hardita90@gmail.com)<sup>✉</sup>, [prasetyabudi29@gmail.com](mailto:prasetyabudi29@gmail.com), [irfanhistoria28@gmail.com](mailto:irfanhistoria28@gmail.com)

Diterima: 16 April 2023 | Direvisi: 19 April 2023 | Diterbitkan: 21 April 2023

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords:

Student Movement,  
MALARI,  
NKK/BKK,  
Orde Baru,  
ORBA.

*The study of the dynamics of the student movement during the New Order era is an interesting topic for further research. The dynamic student movement constantly clashes with the structure of society which is often rigid and binding. Clashes between the student movement and the government also occurred during the New Order era. As one of the elements that contributed to the birth of the New Order, the relationship between the student movement and the New Order government actually appeared to be not harmonious. The student movement, which was considered suspended after the disbandment of KAMI in 1969, actually became increasingly heated in the mid-1970s. Heated actions held by students led to the enactment of the NKK/BKK policy in 1978. Using historical methods, this research does not only use contemporary newspapers as one of its primary sources, but also the results of interviews with historical actors who were student activists in 1974 -1978.*

#### Kata Kunci:

Gerakan Mahasiswa,  
MALARI,  
NKK/BKK,  
Orde Baru,  
ORBA.

Kajian mengenai dinamika gerakan mahasiswa pada masa Orde Baru menjadi salah satu topik yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Gerakan mahasiswa yang dinamis senantiasa berbenturan dengan struktur masyarakat yang seringkali bersifat kaku dan mengikat. Benturan antara gerakan mahasiswa dengan pemerintah juga terjadi sepanjang masa pemerintahan Orde Baru. Sebagai salah satu elemen yang turut membidani lahirnya Orde Baru, hubungan antara gerakan mahasiswa dengan pemerintah Orde Baru justru terlihat tidak harmonis. Gerakan mahasiswa yang dianggap mati suri pasca bubarnya KAMI di tahun 1969, justru kian memanas memasuki pertengahan tahun 1970'an. aksi-aksi panas yang digelar oleh mahasiswa berujung dengan ditetapkannya kebijakan NKK/BKK pada tahun 1978. Menggunakan metode historis, penelitian ini tidak hanya menggunakan koran sezaman sebagai salah satu sumber primernya, namun juga hasil wawancara dengan para pelaku sejarah yang merupakan aktivis mahasiswa tahun 1974-1978.

### PENDAHULUAN

Gerakan Mahasiswa memiliki catatan panjang dalam sejarah dan perubahan yang dialami oleh Indonesia. Sebagai bagian dari kaum intelektual, mahasiswa seringkali hadir mewarnai pergolakan politik yang ada di

Indonesia. Keberadaan kaum intelektual di Indonesia diketahui mulai ada sejak diberlakukannya politik etis pada tahun 1901 di Hindia Belanda. Kebijakan edukasi yang mengizinkan anak-anak dari golongan bangsawan untuk mengenyam Pendidikan ini

kemudian mampu melahirkan intelektual muda yang membangkitkan semangat nasionalisme di Hindia Belanda pada saat itu. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya organisasi pemuda pertama di Hindia Belanda yang bernama Boedi Utomo oleh Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Berdirinya Boedi Utomo seolah mampu menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi kepemudaan di Hindia Belanda.

Pasca Indonesia merdeka, kaum intelektual mulai mengisi berbagai pos-pos perjuangan, mulai dari politik hingga terjun ke ranah perjuangan fisik yang berlangsung sepanjang tahun 1945-1949. Setelah melewati periode revolusi, posisi kaum intelektual yang dikenal dengan sebutan Angkatan '45 mulai digantikan oleh Angkatan baru yang dikemudian hari dikenal dengan angkatan'66. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung antara tahun 1945-1965, berbagai organisasi pergerakan mahasiswa bermunculan, mulai dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang berafiliasi kepada Islam, hingga Concentratie Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang berafiliasi pada komunis dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang beraliran nasionalis.

Kemunculan organisasi pergerakan mahasiswa yang berafiliasi pada aliran politik tertentu menjadi tanda bahwa di tahun-tahun 1955-1960, terjadi sebuah perubahan besar dalam kehidupan universitas. Bila sebelumnya universitas merupakan satu kelompok sosial yang sedikit sekali terpolitisir dan hanya ditugaskan untuk mencetak elite Indonesia, kini

ia berubah menjadi salah satu ajang pertempuran politik. (Francois Raillon, 1985 :9).

Pasca terjadinya peristiwa Gestapu di tahun 1965, gerakan mahasiswa mengambil peranan strategis dalam upaya menormalisasi kondisi sosial politik Indonesia. Mahasiswa yang merupakan perwujudan nyata dari pemuda merasa berhak untuk mengaktualisasikan kekuatan moral yang dimilikinya guna mendorong terjadinya sebuah perubahan sosial (Ridwan Saidi, 1989 : 73-74). Gerakan mahasiswa yang dipayungi oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) melakukan aksi demonstrasi sepanjang tahun 1966, tidak hanya membawa isu penolakan terhadap komunisme, tapi juga kritik terhadap sistem pemerintahan Orde Lama. Aksi demonstrasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong runtuhnya pemerintahan Orde Lama. Dapat dikatakan, bahwa gerakan mahasiswa merupakan salah satu elemen yang membidani lahirnya Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Sebagai salah satu unsur yang turut membidani lahirnya pemerintahan Orde Baru, tentunya hubungan antara gerakan mahasiswa dengan pemerintah diharapkan akan lebih harmoni. Harapan mahasiswa terhadap Orde Baru dibuktikan dengan dukungan dari KAMI terhadap upaya pemerintah Orde Baru yang dinyatakan dalam rapat kerja KAMI di tahun 1967, dimana KAMI mendukung penuh Orde Baru dalam menciptakan stabilitas nasional di bidang sosial, politik dan ekonomi. (Kompas, Modernisasi & RAKER KAMI, Senin 12 Juni 1967). Namun, hubungan baik antara pemerintah orde baru dengan para aktivis gerakan mahasiswa tidak berlangsung lama.

Diawali dengan kebijakan pemerintah Orde Baru yang menaikkan harga kebutuhan pokok yang direspon dengan aksi dari Laskar Arief Rahman Hakim pada tanggal 6 Mei 1968 di Jakarta. (Kompas, Laskar A.R. Hakim Tolak Kenaikan Harga, Selasa 7 Mei 1968). Hubungan antara pemerintah Orde Baru dengan Gerakan Mahasiswa diperburuk dengan pembubaran KAMI di tahun 1969 dan dicanangkannya slogan Back To Campus pada tahun 1970'an oleh pemerintah Orde Baru. slogan tersebut seolah merupakan bentuk penegasan Pemerintah Orde Baru untuk mengembalikan fungsi universitas sebagai pencetak kaum elite intelektual, bukan sekedar elite politik.

Ketakutan pemerintah Orde Baru terhadap gerakan Mahasiswa cukup wajar menurut penulis terlebih ketika melihat lautan gerakan Mahasiswa yang menumbangkan Orde Lama dengan isu Gestapu. Andik Mattulesy sendiri mendefinisikan gerakan mahasiswa sebagai sebuah perilaku kolektif dari sekumpulan individu dalam waktu yang relative lama, terorganisir dan memiliki tujuan untuk melakukan perubahan struktur sosial yang dianggap tidak memenuhi harapan (Andik Mattulesy, 2015 : 75). Jika merujuk kepada penjelasan Andik Matulesy tersebut, maka gerakan mahasiswa berarti identik membawa perubahan struktur sosial dalam sebuah negara. Perubahan ini lah yang menurut penulis dikhawatirkan oleh Pemerintah Orde Baru yang sedang memperkuat pondasi pemerintahan yang sempat digoyahkan oleh peristiwa Gestapu di tahun 1965.

Dinamika hubungan yang terjadi di antara gerakan mahasiswa dengan Pemerintah Orde Baru menjadi salah satu kajian yang menarik

untuk diteliti lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dinamika gerakan mahasiswa pasca peristiwa MALARI yang terjadi di tahun 1974 hingga Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) diterapkan pada tahun 1978.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau yang lebih dikenal dengan metode sejarah. Kuntowijoyo (2013 :69) menjelaskan tahapan penelitian sejarah sebagai berikut; heuristic (pengumpulan sumber), Heuristik merupakan proses pencarian sumber-sumber yang akan digunakan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Dalam penelitian sejarah, sumber sejarah terbagi menjadi dua; sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan dari bentuknya, sumber sejarah terbagi menjadi sumber sejarah lisan, tulisan dan benda.

Dalam penelitian ini, untuk heuristic atau pengumpulan sumber tidak hanya dilakukan dengan studi Pustaka untuk mendapatkan sumber berupa berita dari surat kabar sezaman, namun juga dengan metode wawancara. Hal ini dikarenakan topik yang diambil oleh peneliti adalah memori kolektif. Memori kolektif bicara tentang ingatan masyarakat di suatu daerah. Kedua cara tersebut dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan sumber primer bagi penelitian ini. Adapun sumber sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

Langkah selanjutnya adalah kritik (verifikasi kebenaran dan tingkat keabsahan sumber). Pada tahapan kedua ini, peneliti melakukan kritik sumber dengan memverifikasi data yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan koreksi silang antara sumber sezaman dengan hasil wawancara. Dengan cara tersebut, secara tidak langsung, peneliti juga melakukan kritik dan koreksi terhadap sumber sekunder. Langkah ketiga adalah interpretasi (penafsiran dan analisis penulis terhadap sumber). Dalam langkah ini, peneliti mulai membangun fakta dari data yang telah didapatkan oleh peneliti di lapangan. fakta yang ada kemudian disusun menjadi suatu gambaran tentang peristiwa yang terjadi pada masa lalu. dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mulai mendapatkan gambaran mengenai bagaimana dinamika gerakan mahasiswa di tahun 1974-1978. Langkah terakhir adalah historiografi (penulisan hasil penelitian). Pada tahap ini, peneliti telah mampu memberikan gambaran utuh mengenai dinamika gerakan mahasiswa di tahun 1974-1978.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gerakan Mahasiswa Sebelum Peristiwa Malari 1974**

Studi mengenai gerakan pemuda intelektual (mahasiswa) menjadi salah satu topik yang menarik untuk dikaji di Indonesia. Benedict Anderson menggambarkan sosok pemuda sebagai sekelompok orang yang berada dalam usia peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Sekelompok pemuda tersebut cenderung melakukan penentangan terhadap

tatanan masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, dengan kata lain pemuda identik mendorong terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. (Benedict Anderson, 1988 : 145-146). Mahasiswa sebagai perwujudan nyata dari golongan pemuda merasa memiliki kewajibannya mengaktualisasikan kekuatan moral yang dimilikinya untuk mendorong terjadinya sebuah perubahan.

Andik Mattulesy sendiri mendefinisikan gerakan mahasiswa sebagai sebuah perilaku kolektif dari sekumpulan individu dalam waktu yang relative lama, terorganisir dan memiliki tujuan untuk melakukan perubahan struktur sosial yang dianggap tidak memenuhi harapan (Andik Mattulesy, 2015 : 75). Merujuk kepada penjelasan tersebut, maka gerakan mahasiswa dapat dibagi menjadi dua; yang pertama gerakan mahasiswa sebagai sebuah gerakan politik dan yang kedua mahasiswa sebagai gerakan moral.

Gerakan mahasiswa dikatakan sebagai sebuah gerakan politik ketika menjalankan fungsi sebagai kelompok penekan dalam tatanan masyarakat. Francois Raillon menyatakan bahwa gerakan mahasiswa sebagai intelegensia dinilai merupakan salah satu dari kekuatan politik yang relative otonom dan memiliki inisiatif sendiri terhadap penguasa. (Raillon,1989 : 121). Meskipun seringkali dikaitkan dengan gerakan politik, keterlibatan gerakan mahasiswa dalam gerakan politik hanya dalam bentuk kritik berkenaan dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat. gerakan politik mahasiswa yang lahir dari kepedulian terhadap permasalahan bangsa

justru menegaskan sifat dasar gerakan mahasiswa sebagai sebuah gerakan moral yang bersifat korektif. (Arbi Sanit, 1999 :36).

Sebagai Gerakan Moral, Gerakan mahasiswa memiliki dua peran besar. Pertama, sebagai agen perubahan, yang kedua sebagai kontrol sosial. Sebagai agen perubahan, masyarakat percaya mahasiswa memiliki tanggung jawab atas perubahan negeri ini. Menurut Arief Budiman, konsep gerakan moral dalam gerakan mahasiswa adalah sebuah anggapan bahwa gerakan mahasiswa hanya mampu menjalankan fungsi sebagai pendobrak. Sesudah pendobrakan dilakukan, tugas kekuatan-kekuatan politik seperti partai politik atau organisasi-organisasi politik untuk melakukan pembenahan.(Arbi Sanit,1999 : XIV).

Bidang ekonomi menjadi bidang yang paling sering menjadi sasaran kritik oleh mahasiswa. Oleh karena itu, berbagai upaya perbaikan ekonomi dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru. Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang tentunya diharapkan mampu mendorong terciptanya stabilitas sosial-politik Indonesia, Pemerintah Orde Baru menciptakan sebuah Program pembangunan nasional dituangkan ke dalam suatu perencanaan bertahap, yakni Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun dan Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Anhar Gonggong (2012 :99-101) menjelaskan adanya sekumpulan teknokrat (Bappenas) berlatarbelakang pendidikan barat yang disertai tanggungjawab untuk memonitor atau mengatur perkembangan ekonomi. Selain itu, mereka juga diwajibkan memberikan rekomendasi yang kemudian diterapkan atau dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Penerapan Repelita I didukung oleh pemberlakuan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) yang disahkan sejak bulan Januari tahun 1967. Melalui undang-undang PMA, pemerintah Orde Baru segera membuka pintu bagi para investor asing yang sebelumnya sempat ditolak oleh Pemerintah Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Menurut Martin Rudner (Richard Robinson, 2012 :110), Repelita I didominasi oleh program rehabilitasi infrastruktur industri di Jawa Barat. Terbukanya peluang investasi di bidang Infrastruktur kemudian membuka pintu investasi di bidang lain seperti pertanian. Posisi investor asing yang telah diuntungkan dengan undang-undang PMA kembali dikuatkan dengan pemberlakuan undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 1968. Berbagai kebijakan diberlakukan oleh Pemerintah Orde Baru guna mendukung terlaksananya pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, hingga sampai tahun 1973 investasi modal yang berada dalam kerangka PMA dan PMDN tercatat sebesar 2 miliar, sedangkan investasi diluar kerangka PMA dan PMDN bisa mencapai dua kali lipatnya. Tidak hanya di sektor pertanian dan industri, peluang investasi juga dipeluas ke sektor minyak dan gas bumi.

Hubungan yang baik juga dibangun oleh Soeharto selaku pemimpin Orde Baru dengan Pemerintah Jepang. Komunikasi yang dijembatani oleh Sujono Humardani berhasil mendatangkan Menteri Keuangan Jepang Takeo Fukuda ke Jakarta pada bulan April 1969. Kedatangan Menteri Keuangan Jepang ke Indonesia dibalas dengan Kunjungan Kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden

Soeharto dan Gubernur Bank Indonesia Radius Prawiro pada tahun 1972. Pertemuan-pertemuan dengan pihak Jepang yang berjalan lancar berhasil membuahkan komitmen dari pihak Jepang untuk memberikan pinjaman lunak yang ditukar dengan pasokan minyak mentah (R.E. Elson, 2001:324)

Dominasi Jepang dalam penanaman modal di Indonesia kembali menimbulkan keresahan di dalam hati Gerakan Mahasiswa. Namun berbagai peristiwa dan kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Orde Baru turut serta mendorong kembali masifnya aksi-aksi mahasiswa di awal tahun 1970. Diawali dengan aksi Longmarch pada yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Sastra UI yang menamakan gerakannya dengan “Mahasiswa Menggugat”, Komite Anti Korupsi (KAK) yang dipimpin oleh Jusuf AR, hingga Golongan Putih (Golput) di tahun 1971 yang digagas oleh Arief Budiman/ Soe Hoek Jien yang merupakan kakak kandung dari Soe Hoek Gie.

Jopie Lasut (2011 :79) dalam kesaksiannya menyebutkan bahwa sentiment mahasiswa terhadap Pemerintahan Orde Baru diawali dengan sikap Soeharto yang cenderung menutup ruang dialog dan komunikasi dengan mahasiswa. Menurut Jopie Lasut, Soeharto mulai bersikap keras terhadap mahasiswa sejak mahasiswa mulai menyudutkan istrinya, Bu Tien yang sedang gencar membangun Proyek Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Kritik keras mahasiswa terhadap Proyek pembangunan TMII diiringi dengan isu korupsi yang terjadi dilingkungan keluarga Suharto.

Berbagai isu sosial-politik yang terjadi di awal tahun 1970'an mendorong mahasiswa untuk

kembali mengkritisi berbagai kebijakan ekonomi yang diberlakukan oleh Pemerintah Orde Baru. Ketidakpuasan mahasiswa terhadap Pemerintahan Soeharto kian meningkat. Ketidakpuasan mahasiswa dituangkan dalam diskusi yang diadakan oleh Dewan Mahasiswa UI pada tanggal 24 Oktober 1973. Diskusi yang mengundang mantan aktivis gerakan mahasiswa seperti Cosmas Batubara Angkatan '66, B.M. Diah Angkatan '28 dan Soediro mewakili Angkatan '45 melahirkan Petisi 24 Oktober yang mengecam modal asing, kepincangan pembagian hasil, perkosaan hukum, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Petisi 24 yang dicetuskan di UI kemudian mendorong aksi-aksi diskusi di tempat lain, seperti diskusi yang diadakan pada tanggal 30 November 1973 di Balai Budaya dan Malam Tirakat Dewan Mahasiswa yang diadakan di UI pada 31 Desember 1973. Daniel Dhakidae (2003 :8-10).

Jika Pemerintah melihat aksi ini sebagai upaya merongrong dan mengatur jalannya pembangunan, mahasiswa melihat upaya pemerintah dalam membuka keran investasi sebagai kontra-revolusi yang tidak berafiliasi kepada kepentingan rakyat kecil. Sehingga, aksi-aksi mahasiswa semakin panas. Menindaklanjuti pidato Hariman di acara malam Tirakat, Mahasiswa memulai aksinya di tanggal 10 Januari 1974 dengan menuntut Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yang berisi; Bubarkan Dwifungsi ABRI, Penurunan harga-harga dan Pemberantasan Korupsi. Aksi ini ditanggapi oleh Pemerintah dengan undangan dialog dengan Presiden Soeharto pada tanggal 11 Januari 1974. Melihat tuntutan yang tidak ditanggapi

serius oleh Pemerintah, keesokan harinya Mahasiswa mulai melakukan aksi bakar-bakaran. Patung-patung Sudjono, Ali Moertopo, Tanaka dan Widodo Budidarmo dibakar oleh mahasiswa (Imran Hasibuan, 2003 :62).

Aksi penolakan investasi modal Asing di Indonesia kemudian berlanjut dengan diblokadanya jalan akses menuju halim oleh Mahasiswa pada malam hari tanggal 14 Januari 1974, waktu dimana Perdana Menteri Jepang Tanaka sampai di Indonesia. Kemarahan Mahasiswa dan pemuda semakin memanas dengan munculnya aksi bakar-bakaran di senen dan daerah lainnya. Apel yang direncanakan berlangsung damai di Universitas Trisakti berlangsung ricuh. Peserta aksi yang tadinya tercatat hanya sekitar 200 orang, membludak hingga 2000 orang. Dalam dua hari (15-16) januari 1974, Jakarta terbakar. Hasil perhitngan sementara Mahasiswa Indonesia dari kerusuhan-kerusuhan itu : 9 orang mati, 23 luka-luka, Kedutaan Jepang tidak tersentuh, namun seluruh pusat perdagangan Senen, dan banyak kendaraan dibakar (Francois Raillon, 1985 :113).

### **Dinamika Gerakan Mahasiswa 1974-1978**

Peristiwa Malari tidak hanya berdampak pada gerakan mahasiswa, tapi juga berhasil mengubah peta politik pada saat itu yang ditandai dengan Pembubaran Aspri dan mundurnya Soemitro dari jabatan Pangkomkamtib, dibredelnya surat kabar yang memberitakan gerakan mahasiswa seperti; harian nusantara, Abadi, Indonesia Raya, Harian KAMI, Mahasiswa Indonesia, dan lain-lain (Indra Jaya Piliang, 1999 :45-47)

Pasca terjadi peristiwa Malari, Laksus Pangkomkamtibda Jaya mulai memberlakukan jam malam di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berlaku sejak pukul 18.00-06.00. Kebijakan jam mala mini diikuti dengan larangan berkumpul lebih dari lima orang jika telah memasuki waktu-waktu diberlakukannya jam malam. Tidak hanya suasana malam yang mencekam, Harian Antara juga melaporkan tentang tersebarnya para tentara di berbagai pelosok Jakarta, tidak hanya itu, ditutupnya Ibukota Jakarta yang mengakibatkan suasana siang hari terasa ikut mencekam (Antara, Jam Malam Berlaku di Wilayah DKI Jaya, 16 Januari 1974).

Berbagai isu bernuansa politik kian dihembuskan, mulai dari adanya perang antara dua kubu pendukung Suharto; Ali Murtopo (Aspri-Opsus) dengan Prof. Sumitro Djoyohadikusumo (Mantan Aktivist PSI yang dekat dengan para teknokrat), hingga aksi Malari yang ditunggangi oleh orang-orang yang anti Orde Baru. Demi mengatasi isu yang berkembang sekaligus memperjelas keterlibatan mahasiswa dalam peristiwa Malari, Kopkamtib memanggil 9 Dewan Mahasiswa (Dema/DM) Jakarta; Trisakti, STTN, UI, Atmajaya, UKI, Pancasila, Tarumanegara dan Tujuh-belas Agustus dan Jayabaya. Kesembilan DM ini diminta membuat laporan tertulis mengenai keterlibatan mereka dalam peristiwa Malari (Merdeka, 9 Dema Jakarta dipanggil Kopkamtib, 19 Januari 1974).

Pemanggilan DM ini diikuti dengan penangkapan para aktivis gerakan mahasiswa yang terlibat seperti Hariman Siregar (Ketua DM UI) dan wakilnya yang bernama Gumilang Kartasasmita. Penangkapan kedua aktivis

gerakan mahasiswa tersebut kemudian diikuti dengan penangkapan para tokoh intelektual Indonesia yang diduga terlibat dalam peristiwa Malari seperti; Prof. Sarbini, Drs. Dorojatun Kunjorojakti, Dr. Marsilam Simajuntak dan Haji. Princen yang merupakan ketua Liga Hak Azasi Indonesia (Merdeka, Tokoh-tokoh yang ditangkap menurut Indonesia Raya, 19 Januari 1974). Hariman Siregar yang merupakan ketua DM UI dan terbukti terlibat dalam peristiwa Malari kemudian dijatuhkan vonis 12 tahun kurungan penjara pada tanggal 4 November 1974. Keputusan tersebut mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia (Kompas, Tangisan Jaksa dalam Sidang Perkara Hariman Siregar, 25 November 1974).

Penangkapan para aktivis dan dosen-dosen Universitas Indonesia kemudian diikuti dengan pemanggilan para Rektor se Indonesia oleh Presiden Suharto dan Menteri P&K Prof. Dr. Sjarief Thayeb ke Istana Merdeka. Selain membicarakan pembukaan kembali Universitas yang sempat ditutup sementara akibat dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Januari, Sjarief Thayeb juga menegaskan adanya larangan mengadakan diskusi-diskusi yang bernuansa politik (Merdeka, Sjarief Thayeb akan panggil Rektor-rektor seluruh Indonesia, 24 Januari 1974). Pertemuan antara para rektor seluruh Indonesia dengan Menteri P&K dan Presiden Suharto menghasilkan satu kebijakan baru yaitu SK/028/1974. SK.028/1974 berisi kewajiban mahasiswa untuk mendapatkan izin dari rektor dalam setiap penyelenggaraan kegiatannya. Sementara itu, bagi Organisasi Mahasiswa Ekstra Universitas (OMEK) wajib bergabung dengan Komite Nasional Pemuda

Indonesia (KNPI). SK ini seolah menempatkan pimpinan Universitas sebagai penanggungjawab tertinggi atas apa yang dilakukan oleh Mahasiswa. Dalam setiap kegiatan (Didik Supriyanto, 1998 :37).

Pemberlakuan Sk.028/1974 menjadikan Gerakan Mahasiswa cenderung lebih tenang. Aksi-aksi mahasiswa menolak pemberlakuan SK.028/1974 pun tidak berlangsung lama dan masif. Gerakan Mahasiswa yang sempat tidur sejak Malari 1974 mulai menggeliat bangun menjelang Pemilu di tahun 1977. Isu yang diangkat kali ini adalah pelaksanaan Pemilu dengan Demokratis. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi semacam penolakan atas pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden. Aksi protes mahasiswa kemudian ditanggapi dengan menjadikan ABRI sebagai tameng atau alat untuk menjaga kewibawaan Presiden. Penggunaan ABRI sejak malari memutuskan mitos Aliansi abadi Mahasiswa dengan ABRI yang dibangun oleh angkatan '66. Aksi penolakan pencalonan kembali Soeharto berlanjut dengan datangnya Mahasiswa ke Cendana, kediaman Soeharto dengan membawa spanduk bernada ancaman, "Pencegahan terulangnya peristiwa pertumpahan darah di Pulau Jawa, dimana Politik Indonesia di tentukan" (Dede Suryadi, 1999 :70)

Isu mengenai kegagalan Soeharto dalam menjalankan amanah rakyat menjadi isu kedua yang digaungkan oleh Mahasiswa. Maraknya perilaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang menjadi bukti gagalnya Soeharto dalam membangun Indonesia pasca runtuhnya Orde Lama. Aksi Mahasiswa kembali masif di



sepanjang tahun 1977-1978. Penghinaan terhadap Suharto dan keluarganya berusaha diredam oleh Suharto dengan berbagai cara, termasuk mengutus Prof. Sumitro Djoyohadikusumo untuk memberikan orasi ilmiah di kampus-kampus negeri, namun upaya Suharto tidak juga mampu meredam aksi mahasiswa. Aksi Mahasiswa kian memanas dengan peluncuran Buku Putih oleh Dewan Mahasiswa ITB pada 16 Januari 1978. Buku Putih Perjuangan Mahasiswa 1978 ini berisikan pemikiran mahasiswa mengenai pembangunan Indonesia. Buku Putih tersebut mendapat sambutan yang luar biasa dari berbagai kalangan, karena buku ini dengan berani mengkritik pembangunan Suharto dan menuntut perubahan mendasar di bidang Politik (R. E. Elson, 2005 : 431).

Demi mengatasi Aksi mahasiswa yang semakin memanas, Pemerintah Orde Baru mengambil langkah besar, yaitu kembali membredel surat kabar yang berani memberitakan aksi-aksi mahasiswa. Tidak hanya itu, Pemerintah Orde Baru juga menangkapi sejumlah aktivis gerakan mahasiswa di Indonesia. Memasuki bulan ferbruari, ABRI mulai diinstruksikan untuk masuk kampus dalam rangka mengamankan kampus. Peristiwa ini terjadi di UGM dan ITB. Demi mengatasi ini, kemudian pemerintah membekukan DM (Dewan Mahasiswa) atau apa yang disebut sebagai Student Government di kampus. Kebijakan Pembekuan Dewan Mahasiswa cukup efektif untuk kembali meredam gerakan Mahasiswa, setidaknya sampai Soeharto kembali terpilih sebagai Presiden untuk ketiga kalinya (R. E. Elson, 2005 : 431)

Mahasiswa memilih melakukan aksi mogok kuliah dalam merespon kebijakan pemerintah yang membekukan Dewan Mahasiswa. Terhitung sejak bulan April 1978, kampus mulai sepi. Humas ITB, Sakib Mahmud mencatat dari 7.400 mahasiswa, hanya 6746 yang kembali mendaftar dan mengisi Formulir Rencana Studi (Tempo, Selamat Datang Mahasiswa Baru, 4 Maret 1978). Peristiwa yang sma juga muncul di kampus-kampus ternama seperti UI, IPB, Udayana, Unhas, USU dan Unair. Suasana kampus yang sepi dan tidak ideal ini mengundang pemerintah untuk memikirkan upaya menciptakan kembali kampus yang ideal bagi Mahasiswa. Upaya pengembalian suasana kampus ini kemudian diserahkan kepada pihak kampus sendiri, sedangkan pemerintah memberikan fasilitas yang dibutuhkan.

Melajunya Soeharto kembali ke kursi Presiden yang di dampingi oleh Adam Malik melalui hasil sidang umum MPR 1978 dan dipilihnya Daoed Joesoef sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi satu tanda dimulainya fase baru dalam gerakan Mahasiswa, fase yang menjadikan NKK/ BKK sebagai upaya Normalisasi Kampus menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan kemahasiswaan.

### **Dampak Gerakan Mahasiswa 1978**

Terpilihnya Daoed Joesoef sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam kabinet Pembangunan III, membawa gerakan mahasiswa ke dalam satu fase baru yang nantinya meredam daya kritis mereka kepada pemerintah. Upaya pertama yang ditempuh oleh Daoed Joesoef dalam menormalisasi kampus adalah mengadakan pertemuan dengan para

rektor Universitas Negeri di Indonesia seperti; UI, UGM, ITB, IPB, UNAIR, UNPAD, IKIP Bandung dan Jakarta dalam rangka membicarakan konsep dan upaya-upaya normalisasi kampus di Indonesia. (Kompas, Normalisasi Kehidupan Kampus, Daoed Joesoef Bertemu Rektor, 13 April 1978.) Muncul upaya dari para rektor ini untuk kembali mencairkan Dewan Mahasiswa, namun hanya sebagai wadah kegiatan akademik, bukan politik praktis.

Menghadapi kebijakan NKK/BKK bukan hanya hal yang sulit bagi aktivis Mahasiswa, para Rektor ini pun berada di posisi yang tidak menyenangkan. Rektor yang merupakan pimpinan tertinggi Universitas berperan ganda, baik sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, namun juga sosok ayah yang harus mampu memahami dan menyerap keinginan putra-putrinya. Jika Rektor menolak kebijakan NKK/ BKK, maka bisa saja karir akademisnya berhenti disitu. Namun jika menerima, mereka adalah sosok yang pertama kali harus menjalankan upaya NKK/ BKK sebelum jajaran dibawahnya. Artinya, Rektor harus siap dimusuhi oleh Mahasiswanya.

Sk. No.37/U/1978 tentang NKK/BKK secara implisit melarang dihidupkannya kembali Dewan Mahasiswa. Adapun organisasi yang diizinkan tetap ada adalah SMF (Senat Mahasiswa Fakultas) dan BPFM (Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas) (Didik Supriyanto, 1998:40). Untuk SMF selaku badan Eksekutif Mahasiswa, jika merujuk kepada kesepakatan tentang NKK, maka SMF hanya boleh bergerak di Bidang kesejahteraan Mahasiswa dan Minat/ Kegemaran (Seni dan Olahraga) mahasiswa. SK. Ini kemudian

menjadi legitimasi bagi rektor untuk menentukan kegiatan yang sesuai untuk Mahasiswa.

Tidak hanya sampai disitu, kemudian muncul lah Instruksi yang berkaitan dengan BKK (Badan Koordinasi kampus) yang berfungsi mengawasi jalannya kegiatan Mahasiswa. BKK ini diketuai oleh Pembantu Rektor III bidang kemahasiswaan dan dibantu dengan Dekan Fakultas, Staff Ahli seperti Dosen kemudian Mahasiswa yang dianggap sebagai simpul massa di Fakultasnya. Pengangkatan dan pengesahan BKK ini harus dengan SK Rektor. Artinya, hanya orang yang dianggap aman dan tidak berbahaya apalagi radikal yang dapat menjadi anggota BKK di kampus.

Upaya normalisasi kampus dengan membentuk BKK ditanggapi dengan sikap pesimis oleh Mahasiswa. Dibuktikan dengan keengganan Mahasiswa UI untuk terlibat masuk dalam jajaran BKK pasca dibekukannya Dewan Mahasiswa. Dalam menormalisasi kehidupan Kampus, Pemerintah menerbitkan SKS (Sistem Kredit Semester), dimana mata kuliah dipadatkan jam pelajarannya. Dengan sistem SKS ini, Mahasiswa bisa lebih fokus dengan kuliahnya dan tidak terlibat dengan politik Praktis. Upaya lain yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru dalam mendukung penuh setiap kegiatan mahasiswa yang berbau akademis seperti penyediaan alat-alat peraga kuliah dan laboratorium. Pihak rektorat sebagai penanggungjawab tertinggi universitas juga kemudian turut mendukung dengan menyediakan berbagai UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) baik yang berbau seni maupun Olahraga.

Meskipun kontroversial, kebijakan NKK/ BKK tetap dijalankan dengan berbagai aksi protes dari Mahasiswa. Aksi Protes mahasiswa yang kurang kordinasi ini kemudian meredup di tahun 1980'an. Aksi penolakan pertama berkaitan kebijakan NKK/ BKK datang dari Bandung. Mewakili 12 kampus di Bandung, mahasiswa ITB mendatangi DPR guna menyampaikan hasil rapat koordinasi mahasiswa se- Bandung. Salah satu isinya adalah menolak dibekukannya Dewan Mahasiswa (Kompas, Dewan Mahasiswa Mendatangi DPR, 29 Juni 1978). Keresahan mahasiswa akan dibekukannya Dewan Mahasiswa yang selama ini menaungi gerakan mahasiswa menjadi latar belakang lahirnya aksi-aksi semacam itu. Ketakutan akan tidak idealnya BKK yang dibentuk oleh pihak kampus juga kemudian menjadi isu yang cukup hangat dikalangan aktivis Mahasiswa pada masa itu. Tercatat, ITB adalah Kampus yang cukup sering mengunjungi DPR untuk menyampaikan penolakan mereka terhadap kebijakan NKK/ BKK.

Meskipun aksi-aksi penolakan NKK/BKK marak terjadi dikampus-kampus berbagai kota selain Jakarta, namun aksi mahasiswa terkesan sporadis dan tidak terkoordinir dengan baik. Dibekukannya Dewan Mahasiswa cukup berpengaruh dalam melemahnya gerakan Mahasiswa. Sehingga aksi Mahasiswa kemudian tidak pernah berskala nasional dan berhasil menggoyahkan kebijakan NKK/BKK. Aksi-aksi Mahasiswa ini awalnya ditujukan kepada pihak rektorat atau birokrat kampus. Bentrokan antara pihak kampus dan kekecewaan Mahasiswa ditemukan di UI. Aksi penolakan Mahasiswa atas dibekukannya Dewan Mahasiswa ditanggapi dengan ancaman

mundur dari Rektornya, Mahar Marjono jika Mahasiswa tetap menggunakan Dewan Mahasiswa sebagai wadah organisasi kampus.

Sebagai salah satu tokoh penting dalam gerakan menolak kebijakan NKK/BKK, Lukman Hakim merasakan sendiri betapa represifnya pemerintahan Orde Baru kepada gerakan mahasiswa pada saat itu. Dalam pledoinya, Lukman Hakim menyatakan bahwa NKK/BKK merupakan upaya pemerintah dalam menenangkan gerakan mahasiswa. NKK/BKK dikatakan merupakan salah satu strategi dari pemerintah untuk menciptakan tekhnstruktur, dimana kaum tekhnokrat sengaja digiring untuk menopang struktur yang ada, hal ini biasa terjadi di negara-negara totaliter (Lukman Hakim, 1979 :50-56).

Mahasiswa UI kemudian merespon kebijakan NKK/ BKK dengan mengadakan pertemuan Mahasiswa se-UI pada tanggal 3-4 November 1978. Aksi penolakan NKK/ BKK di UI ini berlanjut dengan Aksi pemasangan poster, pembakaran dan menginap di kampus (Dede Suryadi, 1999:110). Aksi-aksi yang terjadi di UI ini menjadikan UI sebagai salah satu kampus selain UGM dan ITB yang terlambat dalam melaksanakan NKK/ BKK. Meskipun Begitu ramainya penolakan NKK/ BKK di kampus UI, ternyata tidak semua mahasiswa UI menolak NKK/ BKK. Mahasiswa UI yang mendukung NKK/ BKK kemudian berusaha berdialog dengan DPR berkaitan dukungan mereka dalam pelaksanaan NKK/BKK.

Di Kampus UGM Aksi mahasiswa menolak NKK/ BKK juga terjadi dan ditujukan kepada rektornya. Aksi yang terjadi pada 12 Juni 1978 ini dimotori oleh 16 Kordinator Dewan Mahasiswa yang menolak dibubarkannya BKM

(Badan Keluarga Mahasiswa) UGM. Selain itu, mahasiswa juga menuntut agar di ikut sertakan dalam setiap rapat yang membiicarakan kegiatan Mahasiswa (Merdeka, Keluarga Mahasiswa UGM Menolak dibubarkan! 15 Juni 1978.) Melihat Aksinya kurang ditanggapi dengan serius, mahasiswa UGM kemudian mendatangi DPR untuk menuntut dicabutnya NKK/ BKK.

Denny J. A. (1990 :49-53) dalam Gerakan Mahasiswa dan Politik Kaum Muda Era 80-an menyebutkan, bahwa ada perubahan yang signifikan dari bentuk dan fokus gerakan mahasiswa secara umum di tahun 80-an. “Jika di tahun sebelumnya orientasi gerakan mahasiswa terfokus pada gugatan structure kekuasaan, kini orientasinya adalah pembentukan opini politik masyarakat. sehingga aksinya bukan lagi aksi massa, tapi aksi informasi. Bentuk gerakannya pun berubah bukan lagi gerakan politik praktis, tetapi gerakan penyadaran atau gerakan dakwah di bidang sosial politik.” Kebijakan NKK/BKK tidak hanya mengubah struktur di lingkungan kampus saja, tapi juga membangun kultur baru, yaitu kultur akademik. kultur akademik ini lah yang kemudian mendorong menjamurnya forum-forum diskusi, sehingga aksi-aksi mahasiswa yang tadinya hanya berupa mobilisasi massa dengan isu gugatan struktural, beralih menjadi arena pertarungan teori dan konseptual.

## **KESIMPULAN**

Pasca Indonesia merdeka, kaum intelektual mulai mengisi berbagai pos-pos perjuangan, mulai dari politik hingga terjun ke ranah perjuangan fisik yang berlangsung sepanjang

tahun 1945-1949. Setelah melewati periode revolusi, posisi kaum intelektual yang dikenal dengan sebutan Angkatan '45 mulai digantikan oleh Angkatan baru yang dikemudian hari dikenal dengan angkatan'66. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung antara tahun 1945-1965, berbagai organisasi pergerakan mahasiswa bermunculan, mulai dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang berafiliasi kepada Islam, hingga Concentratie Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang berafiliasi pada komunis dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang beraliran nasionalis.

Berdirinya Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto secara otomatis memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Harapan besar rakyat terhadap perubahan Indonesia digambarkan dalam aksi-aksi demonstrasi mahasiswa Indonesia yang semakin masif. Tuntutan demi tuntutan mewarnai perjalanan terbentuknya Orde Baru. Sebagai salah satu unsur yang turut membidani lahirnya pemerintahan Orde Baru, tentunya hubungan antara gerakan mahasiswa dengan pemerintah diharapkan akan lebih harmoni.

Berbagai isu sosial-politik yang terjadi di awal tahun 1970'an mendorong mahasiswa untuk kembali mengkritisi berbagai kebijakan ekonomi yang diberlakukan oleh Pemerintah Orde Baru. Ketidakpuasan mahasiswa terhadap Pemerintahan Soeharto kian meningkat. Puncaknya, pada tanggal 15 Januari 1974 meletus lah sebuah aksi demonstrasi besar-besaran yang membakar Ibukota Jakarta.

Peristiwa yang dikenal dengan Malari tersebut menjadi titik tolak bangkitnya Gerakan Mahasiswa yang sempat redup di awal Pemerintahan Suharto.

Pasca terjadinya peristiwa Malari, Gerakan Mahasiswa kembali memasuki fase pendinginan, fase dimana gerakan mahasiswa tidak lagi bersifat masif. Aksi-aksi mahasiswa tidak lagi berbentuk aksi demonstrasi namun membentuk forum atau grup diskusi. Hal ini berjalan sepanjang tahun 1974-1976. Gerakan mahasiswa baru menggeliat kembali memasuki tahun 1977. Aksi-aksi mahasiswa yang kembali masif seolah merupakan akumulasi dari keresahan yang terpendam selama dua tahun belakangan. Buku Putih Perjuangan Mahasiswa yang diterbitkan di ITB pada bulan Januari 1978 menjadi momentum kembalinya Gerakan mahasiswa sebagai sebuah gerakan moral. Meskipun gerakan ini kemudian dipukul mundur dengan penerapan kebijakan NKK/BKK yang diberlakukan pada akhir tahun 1978.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa dinamika Gerakan mahasiswa yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1974-1978 mengalami beberapa fase, mulai dari fase radikal (Peristiwa Malari), fase pendinginan (1974-1976) dan fase kembali radikalnya gerakan mahasiswa (1977-1978). Dari ketiga fase tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah turut serta mempengaruhi Gerakan Mahasiswa di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Buku

Ahmaddani G. Martha dkk., Pemuda Indonesia dalam sejarah Perjuangan Bangsa. Jakarta : Kurnia Esa, 1985

- Andik Matulesy (2005), Mahasiswa dan Gerakan Sosial, Surabaya : Srikandi.
- Arbi Sanit(1999). Pergolakan Melawan Kekuasaan, Yogyakarta : Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Benedict Anderson (1988). Revolusi Pemoeda : Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Daniel Dhakidae, (2003). Cendekiawan dan Kekuasaan Orde Baru, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Denny J.A. (1990). Gerakan Mahasiswa dan Politik Kaum Muda era 80-an. Jakarta : Cv. Miswar.
- Didik Supriyanto, Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/ BKK, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998
- Francois Raillon, Politik dan Ideologi Mahasiswa : Pembentukan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974. Jakarta: LP3ES, 1989
- Hariyadhie, Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 Dalam percaturan Politik Nasional, Jakarta : Golden Terayon Press, 1994
- Imran Hasibuan, dkk.,Hariman dan Malari : Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Penanaman Modal Asing, Jakarta : Q-Communication, 2011.
- Jopie Lasut (2011). MALARI : Melawan Soeharto dan Barisan Jenderal Orba, Depok : Yayasan Penghayat Keadilan.
- Kuntowijoyo (2013). Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta : Tiara Wacana
- M.C. Ricklefs (1998). Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Pledoi Lukman Hakim (Ketua Dema UI) tahun 1978 aksi penolakan NKK/BKK
- R.E. Elson (2005). Suharto Sebuah Biografi Politik, Jakarta : Pustaka Minda Utama.
- Ridwan Saidi (1989). Mahasiswa dan Lingkaran Politik, Jakarta : Lembaga Pers Mahasiswa Mapussy Indonesia.
- Soe Hok Gie, Catatan Seorang Demonstran, Jakarta : LP3ES, 1989
- Zed, Mestika (2014). Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia..

### Daftar Jurnal Ilmiah dan Skripsi

- Dede Suryadi,Proses Lahir dan Kontroversi NKK/BKK(Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan) 1978-1980 , Skripsi Sarjana FSUI, 1999.
- Elis Mardianti, Gerakan Mahasiswa Dalam Pusaran Tiga Orde Kekuasaan : Antara Gerakan Moralis atau Gerakan Politis,

POLITICOS : Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (2) 2002. P. 81-103.

Indra Jaya Piliang, Koreksi demi Koreksi: Pergerakan Mahasiswa Indonesia Pasca Malari Sampai Penolakan NKK/BK, Skripsi Sarjana, FSUI, 1999.

Sri Mastuti Purwaningsih, Gerakan Mahasiswa dan Kebijakan NKK/BKK Tahun 1978-1983, AVATARA : Jurnal Pendidikan Sejarah, Volume 4, No. 1, Maret 2016. P. 99-106

Yohanes de Britto Wirajati, Mahasiswa dan MALARI di Jakarta : Telaah Perilaku Kolektif Mahasiswa Indonesia 1973-1974, Lensa Budaya, Vol.13, No.2, 2018. P.166-177.

### **Daftar Koran Sezaman**

Antara, Jam Malam Berlaku di Wilayah DKI Jaya, 16 Januari 1974.

Kompas, Dewan Mahasiswa Mendatangi DPR, 29 Juni 1978.

Kompas, Laskar A.R. Hakim Tolak Kenaikan Harga, Selasa 7 Mei 1968.

Kompas, Modernisasi & RAKER KAMI, Senin 12 Juni 1967.

Kompas, Normalisasi Kehidupan Kampus, Daoed Joesoef Bertemu Rektor, 13 April 1978.

Kompas, Tangisan Jaksa dalam Sidang Perkara Hariman Siregar, 25 November 1974.

Merdeka, 9 Dema Jakarta dipanggil Kopkamtib, 19 Januari 1974.

Merdeka, Keluarga Mahasiswa UGM Menolak dibubarkan! 15 Juni 1978.

Merdeka, Sjarief Thayeb akan panggil Rektor-rektor seluruh Indonesia, 24 Januari 1974

Merdeka, Tokoh-tokoh yang ditangkap menurut Indonesia Raya, 19 Januari 1974.

Tempo, Selamat Datang Mahasiswa Baru, 4 Maret 1978.